

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 7/KMK.09/2011
 TENTANG : TATA CARA PENYAMPAIAN DAN
 PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK
 PRIBADI (LP2P) PEJABAT/ PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-1:

Untuk Pimpinan
 Kementerian /Lembaga

SIFAT RAHASIA

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
 TAHUN PAJAK

1. Nama Lengkap/NIP	:		NPWP	:	
2. Pangkat	:		Mulai tanggal	:	
3. Jabatan	:		Mulai tanggal	:	
4. Unit Kerja	:				
5. Alamat - kantor	:		Kode Pos	:	<input type="text"/>
- rumah	:		Kode Pos	:	<input type="text"/>
6. Status	:	Kawin/ Tidak kawin *)			
7. Nama Isteri/ Suami	:		Pekerjaan	:	

Pajak Penghasilan				
No	Uraian	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang di potong/dipungut pihak ketiga (Rp)	Pajak yang dibayar sendiri (Rp)
1.	Penghasilan Neto Tahun	Rp		
2.	Penghasilan Kena Pajak Th	Rp		
3.	Pajak Penghasilan 4 tahun sebelumnya:			
	a. Tahun Pajak			
	b. Tahun Pajak			
	c. Tahun Pajak			
	d. Tahun Pajak			

II. Pajak Bumi dan Bangunan **)						
No	SPPT/SKP	Nomor Obyek Pajak	Atas Nama	Keterangan	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang telah dibayar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
3.						

III. Pajak Kendaraan Bermotor **)							
No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Atas nama	Pajak yang telah dibayar (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
 **) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi,
 dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai
 bentuk ini

Jakarta,
 Yang melaporkan

Nama jelas
 NIP.

SIFAT RAHASIA

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
TAHUN PAJAK

1.	Nama Lengkap/NIP	:		NPWP	:	
2.	Pangkat	:		Mulai tanggal	:	
3.	Jabatan	:		Mulai tanggal	:	
4.	Unit Kerja	:				
5.	Alamat	:				
	- kantor	:				Kode Pos
	- rumah	:				Kode Pos
6.	Status	:	Kawin/ Tidak kawin *)			
7.	Nama Isteri/ Suami	:		Pekerjaan	:	

Pajak Penghasilan					
No	Uraian		Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang di potong/dipungut pihak ketiga (Rp)	Pajak yang dibayar sendiri (Rp)
1.	Penghasilan Neto Tahun	Rp			
2.	Penghasilan Kena Pajak Th	Rp			
3.	Pajak Penghasilan 4 tahun sebelumnya:				
	a. Tahun Pajak				
	b. Tahun Pajak				
	c. Tahun Pajak				
	d. Tahun Pajak				

II. Pajak Bumi dan Bangunan **)						
No	SPPT/SKP	Nomor Obyek Pajak	Atas Nama	Keterangan	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang telah dibayar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.						

III. Pajak Kendaraan Bermotor **)							
No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Atas nama	Pajak yang telah dibayar (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
 **) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

Jakarta,
 Yang melaporkan

 Nama jelas
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)

TAHUN PAJAK

Diisi dengan Tahun Pajak

1. Diisi dengan nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP) terbaru dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan yang tercantum pada "Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak" atau "Surat Keterangan Terdaftar". Bagi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan belum memiliki NPWP, maka NPWP tidak perlu diisi.
Bagi Wajib Pajak LP2P wanita kawin yang tidak memiliki NPWP:
 - Bagi wanita kawin yang tidak memiliki NPWP dan suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh), maka NPWP diisi sesuai dengan NPWP suami.
 - Bagi wanita kawin yang tidak memiliki NPWP dan suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh), maka NPWP tidak perlu diisi.
2. Diisi dengan pangkat dan tanggal mulai ditetapkannya pangkat yang bersangkutan.
3. Diisi dengan jabatan dan tanggal mulainya yang bersangkutan menduduki suatu jabatan.
4. Diisi sesuai dengan unit kerja dimana yang bersangkutan ditempatkan/bekerja dengan jabatan seperti tersebut pada butir 3.
5. Diisi dengan alamat kantor dan alamat rumah yang bersangkutan.
6. Diisi dengan status perkawinan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Status yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari tahun sebelumnya. Dalam hal yang bersangkutan berstatus duda atau janda, diisi dengan "Tidak Kawin".
7. Diisi dengan nama isteri/suami, dan pekerjaan yang bersangkutan.

I. PAJAK PENGHASILAN

1. Diisi dengan tahun sebelum tahun pelaporan LP2P
 - 1.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan LP2P Formulir 1770 huruf A angka 5 atau Formulir 1770 S huruf A angka 4.
 - 1.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 14, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 14.
2. Diisi dengan tahun sebelum tahun pelaporan LP2P
 - 2.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf B angka 11 atau formulir 1770 S huruf B angka 8;
 - 2.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 18, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 17.
Kolom: "Pajak yang terutang".
 - a. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf C angka 14 atau formulir 1770 S huruf C angka 11;
 - b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 21, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 18.
Kolom "Pajak yang dipotong/dipungut pihak ke-3".
 - a. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf D angka 15 atau formulir 1770 S huruf D angka 12.
 - b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dengan angka yang sama seperti tersebut pada butir 2.2.2.b
Kolom "Pajak yang dibayar sendiri".
 - a. Diisi dari penjumlahan angka yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun formulir 1770 huruf D angka 17 huruf a, b, c, d, dan huruf E angka 19 huruf a (PPh Pasal 29) atau formulir 1770 S huruf D angka 15 dan huruf E angka 16 huruf a (PPh Pasal 29).
 - b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dengan tanda " " .
 3. Diisi dengan Pajak Penghasilan 4 (empat) tahun sebelumnya.

II. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Diisi sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang berdasarkan SPPT tahun terakhir yang telah dibayar atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/suami dan anak-anak yang belum dewasa.

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan SPPT atau SKP.
Kolom (3) : Diisi dengan Nomor dari Objek Pajak atau SPPT yang bersangkutan.
Kolom (4) : Diisi dengan nama yang tercantum dalam SPPT atau SKP.
Kolom (5) : Diisi seperlunya, antara lain nama pemilik harta dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (4).
Kolom (6) : Diisi dengan PBB yang terutang.
Kolom (7) : Diisi dengan PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Diisi sesuai dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibayar atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/suami dan anak-anak yang belum dewasa.

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai misalnya bus, truk, mobil, sepeda motor, yacht, jet ski dan kendaraan sejenis lainnya.
Kolom (3) : Diisi dengan nomor polisi kendaraan bermotor.
Kolom (4) : Diisi dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor.

- Kolom (5) : Diisi dengan tahun perolehan kendaraan bermotor.
Kolom (6) : Diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB/STNK.
Kolom (7) : Diisi dengan pajak kendaraan bermotor yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.
Kolom (8) : Diisi seperlunya, antara lain nama pemilik dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (6).
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 7/KMK.09/2011
TENTANG : TATA CARA PENYAMPAIAN DAN
PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK
PRIBADI (LP2P) PEJABAT/ PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : (1)
Pangkat/Golongan : (2)
Jabatan : (3)
Unit Kerja : (4)
.....

dengan ini menyatakan kesediaan untuk:

- A. 1. menyampaikan daftar harta kekayaan secara benar kepada Menteri Keuangan;
2. memberikan keterangan dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan harta kekayaan.
- B. 1. dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan, dalam hal daftar dan keterangan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas tidak benar;
2. diserahkan penanganan selanjutnya kepada penegak hukum, dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana lainnya atas kepemilikan harta kekayaan.

Daftar harta kekayaan serta keterangan dan dokumen-dokumen tersebut di atas hanya diberikan untuk digunakan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan tetap menjaga kerahasiaan daftar harta kekayaan serta keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,.....20.... (5)

Yang menyatakan,

meterai
Rp 6.000,-

Nama(1)
NIP (1)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : (1)
Pangkat/Golongan : (2)
Jabatan : (3)
Unit Kerja : (4)
.....

dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Menteri Keuangan untuk meminta informasi
KHUSUS

mengenai:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan/atau
 - b. rekening bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam rangka pengujian kebenaran terhadap daftar harta kekayaan yang saya sampaikan.
- Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.... (5)

Pemberi kuasa,

meterai
Rp 6.000,-

Nama(1)

NIP (1)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KUASA

- (1) Diisi dengan nama lengkap sesuai surat keputusan kepangkatan terakhir, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) diisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan.
 - (2) Diisi dengan pangkat/golongan sesuai surat keputusan kepangkatan terakhir.
 - (3) Diisi dengan jabatan sesuai surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
 - (4) Diisi dengan unit kerja sesuai surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dengan urutan unit terkecil sampai dengan unit eselon I.
 - (5) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan dan surat kuasa dimaksud.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 7/KMK.09/2011
 TENTANG : TATA CARA PENYAMPAIAN DAN
 PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK
 PRIBADI (LP2P) PEJABAT/ PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-1:

Untuk Pimpinan
 Kementerian /Lembaga

SIFAT RAHASIA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 TAHUN PAJAK

Nama Lengkap/NIP						NPWP:	
I. TANAH DAN BANGUNAN **)							
No	Lokasi/Alamat	Tahun Perolehan	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Luas Tanah/ Luas Bangunan/ NOP	Asal Usul	Nilai Perolehan	N/OP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
2.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
3.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
Jumlah							
II. KENDARAAN BERMOTOR **)							
No.	Jenis Kendaraan/Merk/ Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Nomor Polisi/ Nomor Identifikasi	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nilai Perolehan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.							
2.							
3.							
Jumlah							
III. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA **)							
No	Jenis	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp dan/atau valas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.							
2.							
3.							
Jumlah						Rp. valuta asing	
IV. SURAT BERHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERHARGA LAINNYA **)							
No	Jenis	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Investasi (dari th ...s.d. th...)	Jumlah Lembar/ % Kepemilikan	Nama Perusahaan/ Kustodian	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp dan/atau valas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
Jumlah						Rp. valuta asing	
JUMLAH TOTAL :							(9)

Catatan: **) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi,
 dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai
 bentuk ini

.....,
 Yang melaporkan,

Nama jelas
 NIP.

SIFAT RAHASIA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
TAHUN PAJAK

Nama Lengkap/NIP						NPWP:	
I. TANAH DAN BANGUNAN **)							
No	Lokasi/Alamat	Tahun Perolehan	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Luas Tanah/ Luas Bangunan/ NOP	Asal Usul	Nilai Perolehan	NJOJ (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
2.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
3.				LT: m2 LB: m2 NOP:			
Jumlah							
II. KENDARAAN BERMOTOR **)							
No.	Jenis Kendaraan/ Merk/ Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Nomor Polisi/ Nomor Identifikasi	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nilai Perolehan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.							
2.							
3.							
Jumlah							
III. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA **)							
No	Jenis	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp dan/atau valas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.							
2.							
3.							
Jumlah						Rp.	valuta asing
IV. SURAT BERHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERHARGA LAINNYA **)							
No	Jenis	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Investasi (dari th ...s.d. th...)	Jumlah Lembar/ % Kepemilikan	Nama Perusahaan/ Kustodian	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp dan/atau valas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
Jumlah						Rp.	valuta asing
JUMLAH TOTAL :							(9)

Catatan: **) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

.....,
Yang melaporkan,

Nama jelas _____
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HARTA KEKAYAAN

TAHUN PAJAK

Diisi dengan Tahun Pajak.

Nama lengkap/NIP dan NPWP:

Diisi dengan nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP) terbaru dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Petunjuk Pengisian Daftar Harta Kekayaan Bagi Suami:

1. Dalam hal suami isteri adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, kewajiban menyampaikan DHK hanya dilakukan oleh suami, isteri cukup menginformasikan bahwa DHK isteri telah dilaporkan dalam DHK yang dilaporkan suami yang bersangkutan;
2. Dalam hal suami adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, dan isteri bukan pejabat/pegawai kementerian Keuangan, sepanjang:
 - a. suami isteri tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; dan
 - b. isteri tidak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka suami menyampaikan DHK yang dimiliki oleh suami dan isteri.
3. Dalam hal suami adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, dan isteri bukan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, sepanjang suami isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka suami menyampaikan DHK dari harta yang dimiliki suami.

Petunjuk Pengisian Daftar Harta Kekayaan Bagi Isteri:

1. Dalam hal isteri adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, dan suami bukan pejabat/pegawai kementerian Keuangan, sepanjang:
 - a. suami isteri tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; dan
 - b. isteri tidak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka isteri menyampaikan DHK yang dimiliki oleh suami dan isteri.
2. Dalam hal isteri adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, dan suami bukan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, sepanjang suami isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka isteri menyampaikan DHK dari harta yang dimiliki isteri.

I. TANAH DAN BANGUNAN

Mencakup tanah dan atau bangunan yang dimiliki, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Harta kekayaan tanah dan atau bangunan ini mencakup tanah dan/atau bangunan seperti yang dimaksud dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan nama jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota.

Kolom (3) : Diisi dengan tahun perolehan harta.

Kolom (4) : Diisi nama yang tercantum dalam Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah dan hubungan keluarga dengan pelapor apabila nama yang tercantum dalam Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah berbeda dengan nama pelapor.

Kolom (5) : Diisi luas tanah, luas bangunan (apabila ada), dan Nomor Objek Pajak (NOP)

Kolom (6) : Diisi dengan :

- Hasil sendiri;
- Warisan;
- Hibah;
- Hasil sendiri dan warisan;
- Hasil sendiri dan hibah;
- Warisan dan hibah;
- Hasil sendiri, warisan dan hibah; atau
- Lainnya (misalnya kredit, angsuran, pinjaman).

Kolom (7) : Diisi dengan harga perolehan tanah dan atau bangunan tersebut.

Kolom (8) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT.

II. KENDARAAN BERMOTOR

Mencakup seluruh jenis alat transportasi yang dimiliki, baik untuk keperluan pribadi, untuk keperluan usaha maupun sebagai barang dagangan.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) : - Diisi jenis kendaraan yang dimiliki misalnya bus, truk, mobil, yacht, jet ski, dan kendaraan sejenis lainnya;

- Diisi dengan merk kendaraan misalnya Toyota Altis, Honda Accord, dan lain-lain;

- Diisi tahun pembuatan sebagaimana tercantum dalam BPKB /STNK.

Kolom (3) : Diisi dengan tahun perolehan kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor polisi atau nomor indentifikasi lainnya untuk jenis kendaraan di atas air.

Kolom (5) : Diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB dan hubungan keluarga dengan pelapor apabila nama yang tercantum BPKB berbeda dengan nama pelapor.

Kolom (6) : Diisi dengan:

- Hasil sendiri;
- Warisan;
- Hibah;
- Hasil sendiri dan warisan;
- Hasil sendiri dan hibah;
- Warisan dan hibah;
- Hasil sendiri, warisan dan hibah; atau
- Lainnya (misalnya kredit, angsuran, pinjaman).

Kolom (7) : Diisi dengan nilai perolehan kendaraan bermotor

III. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA

Diisi seluruh uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan setara kas yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/suami dan anak-anak yang belum dewasa.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan:

- Uang tunai;
- Deposito;
- Giro;
- Tabungan; atau
- Setara Kas

Kolom (3) : a. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/tanda bukti kepemilikan;
b. Hubungan Keluarga diisi dengan:

- Yang bersangkutan;
- Isteri/suami;
- Anak; atau
- Lainnya.

Kolom (4) : Diisi dengan:

- Hasil sendiri;
- Warisan;
- Hibah;
- Hasil sendiri dan warisan;
- Hasil sendiri dan hibah;
- Warisan dan hibah; atau
- Hasil sendiri, warisan dan hibah.

Kolom (5) : Diisi dengan nama bank/Lembaga Penyimpan.

Kolom (6) : Diisi dengan nomor rekening.

Kolom (7) : Diisi dengan nilai nominal pada saat pelaporan dalam rupiah dan/atau valuta asing.

IV. SURAT BERTHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERTHARGA LAINNYA)

Diisi seluruh obligasi, saham dan surat berharga lainnya yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/suami dan anak-anak yang belum dewasa, termasuk juga harta kekayaan tidak bergerak dan tidak berwujud, misalnya hak cipta, hak paten, hak usaha dan lain-lain yang dikelompokkan kedalam surat berharga lainnya.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan:

- Obligasi;
- Saham;
- Hak Cipta;
- Hak Paten;
- Hak Usaha; atau
- Lainnya (sebut jenisnya bagaimana tertera dalam surat/tanda bukti kepemilikan)

Kolom (3) : a. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/tanda bukti kepemilikan;
b. Hubungan Keluarga diisi dengan:

- Yang bersangkutan;
- Isteri/suami;
- Anak; atau
- Lainnya

Kolom (4) : Diisi dengan:

- Hasil sendiri;
- Warisan;
- Hibah;
- Hasil sendiri dan warisan;
- Hasil sendiri dan hibah;
- Warisan dan hibah; atau
- Hasil sendiri, warisan, dan hibah.

Kolom (5) : Diisi dengan periode tahun investasi.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah lembar/persentase kepemilikan.

Kolom (7) : Diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut/Kustodian.

Kolom (8) : Diisi dengan nilai jual surat berharga tersebut sesuai harga pasar pada saat pelaporan dalam rupiah dan/atau valuta asing.

Kolom (9) : Diisi dengan jumlah keseluruhan dari total daftar harta kekayaan yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd

GIARTO

NIP 195904201984021001